



# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

**A. PENDAHULUAN**

**1) Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, adalah:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
4. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dalam rangka percepatan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara terus menerus.

Evaluasi juga digunakan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terarah dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

## **2) Dasar Hukum**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi; dan

13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 3) Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini, adalah:

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
2. Tersedianya data dan informasi dibidang kepegawaian dan manajemen sumber daya aparatur sipil daerah,
3. Bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan berikutnya,
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD pada akhir tahun.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2025, yaitu 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang hingga 31 Maret 2025 atau Triwulan I dapat dilihat pencapaian kinerja, sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.893.999.555,- guna mendukung 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistic Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

#### **Monitoring dan Evaluasi:**

Program ini telah direalisasikan anggaran pada Triwulan I sebesar 21,44% atau Rp. 1.049.410.332,-.

## **2) Program Kepegawaian Daerah**

Program ini pun termasuk dalam tujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan pagu dana sebesar alokasi dana sebesar Rp. 1.753.876.200,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan, peningkatan kapasitas kinerja, dan evaluasi kinerja aparatur beserta Perlengkapannya mendukung 4 (empat) kegiatan, meliputi:

1. Pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN
  - 1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
  - 2) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
  - 3) Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
  - 4) Fasilitas Lembaga profesi ASN
  - 5) Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1) Pengelolaan mutasi ASN
  - 2) Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan kompetensi ASN
  - 1) Peningkatan kapasitas kinerja ASN
  - 2) Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN
  - 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
4. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 4) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

- 5) Pembinaan Disiplin ASN
- 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

**Monitoring dan Evaluasi:**

Program ini untuk mendukung dan mengevaluasi pengadaan, pemberhentian, mutasi dan promosi serta kompetensi ASN, realisasi anggaran Triwulan I sebesar Rp. 122.882.165,- atau 7,01%.

**3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 788.301.800,-, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional

- 1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan

**Monitoring dan Evaluasi:**

Program ini melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan, dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 8.727.000,- atau 1,11%.

**C. KENDALA DAN PENYELESAIAN**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan pada pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumberdaya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga kebijakan yang diambil didasarkan pada regulasi dan juga arahan pimpinan.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan yaitu terkait dengan waktu pelaksanaan, dimana untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain harus menyesuaikan dengan jadwal dari pihak tersebut. Seperti pada kegiatan Pengiriman atau Pelaksanaan Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV serta Diklat Pra Jabatan CPNS, untuk pengiriman peserta Diklat maka harus menyesuaikan dengan jadwal dari pihak penyelenggara.

Demikian juga dengan pelayanan administrasi kepegawaian, mengingat pengurusan kenaikan pangkat, pengelolaan pensiun, kartu identitas pegawai, dilakukan ke BKN Regional XII Pekan Baru dan BKN Pusat di Jakarta sehingga waktu untuk penyampaian dokumen yang dikirim harus tepat waktu.

Upaya yang telah dilakukan terkait dengan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah melakukan Koordinasi yang intensif baik dengan Pihak atau instansi Terkait diluar Pemerintah Kota Bukittinggi juga dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan percepatan dalam pengumpulan atau verifikasi bahan usulan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian lainnya.

## D. KEUANGAN

### 1) Anggaran Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Persentase	Ket
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.436.177.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.436.177.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	60,12%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.785.608.800,00	37,46%	
	Belanja Hibah	180.000.000,00	2,42%	

Pagu dana yang tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk Belanja Pegawai, baik Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan 34 (Tiga puluh empat) sub Kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

### 2) Realisasi Anggaran

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.436.177.555,00</b>	<b>1.181.019.497,00</b>	<b>15,88%</b>
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.436.177.555,00</b>	<b>1.181.019.497,00</b>	<b>15,88%</b>
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	983.007.002,00	21,99%
	Belanja Barang dan Jasa	2.785.608.800,00	198.012.495,00	7,11%
	Belanja Hibah	180.000.000,00	0	0,00%

Capaian realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas yaitu 15,88%, dikategorikan rendah, karena sesuai dengan anggaran kas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada Triwulan I sebesar 48,77%.

Rendahnya serapan anggaran pada triwulan I ini antara lain karena beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan, adanya perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.



## **E. PENUTUP**

### **1) Kesimpulan**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dari 3 (Tiga) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, namun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat kegiatan telah melebihi target yang direncanakan bahkan terdapat kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pencapaian kinerja anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.181.019.497,- atau 15,88%.

Rendahnya serapan anggaran disebabkan karena beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan, adanya perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

### **2) Saran**

Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dapat lebih optimal, kiranya Kasubid/Kasubag dan PPTK dapat mempedomani kerangka acuan kerja kegiatan masing-masing sehingga ketepatan waktu dan realisasi anggaran dapat terpenuhi.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025.

Bukittinggi, 28 Maret 2025

**KETUA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**



**TEU HERMAWAN, S.T, M.Sc**  
Pembina Tk. I, NIP. 197505212000031003



**RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Bulan			TRIWULAN I				Ket
					Januari	Februari	Maret	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
<b>5.03</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</b>			<b>7.436.177.555,00</b>	<b>157.414.425,00</b>	<b>249.690.718,00</b>	<b>773.914.354,00</b>	<b>1.181.019.497,00</b>	<b>15,88%</b>			
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>4.893.999.555,00</b>	<b>157.414.425,00</b>	<b>185.046.669,00</b>	<b>706.949.238,00</b>	<b>1.049.410.332,00</b>	<b>21,44%</b>			
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19.580.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	19.580.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 Dokumen	40,00%	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4.575.476.555,00</b>	<b>157.414.425,00</b>	<b>157.840.840,00</b>	<b>685.251.737,00</b>	<b>1.000.507.002,00</b>	<b>21,87%</b>			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/Bulan	4.563.508.755,00	157.414.425,00	157.840.840,00	685.251.737,00	1.000.507.002,00	21,92%	3 Bulan	25,00%	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.967.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 Bulan	25,00%	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>14.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	14.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>105.950.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>14.572.000,00</b>	<b>13,75%</b>			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.656.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	3.179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.750.000,00	0,00	12.757.000,00	1.815.000,00	14.572.000,00	16,24%	-	25,00%	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>36.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.904,00</b>	<b>7.228.731,00</b>	<b>10.142.635,00</b>	<b>27,89%</b>			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.362.000,00	0,00	2.613.500,00	7.113.500,00	9.727.000,00	29,16%	1 Laporan	35,00%	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	300.404,00	115.231,00	415.635,00	13,85%	-	25,00%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Bulan			TRIWULAN I				Ket
					Januari	Februari	Maret	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>			<b>142.582.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.925,00</b>	<b>12.653.770,00</b>	<b>24.188.695,00</b>	<b>16,96%</b>			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.190.000,00	0,00	4.466.000,00	4.557.520,00	9.023.520,00	23,03%	3 Bulan/ 1 Unit	25,00%	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	98.500.000,00	0,00	6.368.925,00	6.191.250,00	12.560.175,00	12,75%	3 Bulan/ 12 Unit	25,00%	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	2.840.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	24,65%	-	25,00%	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.052.100,00	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00	92,83%	3 Unit	100,00%	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>1.753.876.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.030.549,00</b>	<b>60.851.616,00</b>	<b>122.882.165,00</b>	<b>7,01%</b>			
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>449.120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.200,00</b>	<b>30.929.556,00</b>	<b>50.636.756,00</b>	<b>11,27%</b>			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	18.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	60.707.400,00	0,00	17.714.700,00	7.471.250,00	25.185.950,00	41,49%	-	50,00%	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	18.428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	170.721.500,00	0,00	1.992.500,00	23.458.306,00	25.450.806,00	14,91%	-	25,00%	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>433.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.505.274,00</b>	<b>16.225.000,00</b>	<b>37.730.274,00</b>	<b>8,70%</b>			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	44.590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	83.410.000,00	0,00	4.726.750,00	12.700.000,00	17.426.750,00	20,89%	-	25,00%	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	305.607.600,00	0,00	16.778.524,00	3.525.000,00	20.303.524,00	6,64%	-	15,00%	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>722.791.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.500,00</b>	<b>1.785.750,00</b>	<b>5.556.250,00</b>	<b>0,77%</b>			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 Orang	440.586.800,00	0,00	3.770.500,00	1.612.500,00	5.383.000,00	1,22%	-	15,00%	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	221.673.200,00	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00	0,08%	-	10,00%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Bulan			TRIWULAN I				Ket
					Januari	Februari	Maret	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	60.531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>148.356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047.575,00</b>	<b>11.911.310,00</b>	<b>28.958.885,00</b>	<b>19,52%</b>			
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20.215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 Dokumen	0,00%	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	17.864.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	0,00	14.434.075,00	0,00	14.434.075,00	83,82%	-	90,00%	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	150 Orang	16.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	39.225.200,00	0,00	2.613.500,00	6.113.500,00	8.727.000,00	22,25%	-	25,00%	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	13.689.100,00	0,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	25,35%	-	30,00%	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	2 Dokumen	23.270.100,00	0,00	0,00	2.327.810,00	2.327.810,00	10,00%	-	25,00%	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>788.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.500,00</b>	<b>6.113.500,00</b>	<b>8.727.000,00</b>	<b>1,11%</b>			
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>788.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.500,00</b>	<b>6.113.500,00</b>	<b>8.727.000,00</b>	<b>1,11%</b>			
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>788.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.500,00</b>	<b>6.113.500,00</b>	<b>8.727.000,00</b>	<b>1,11%</b>			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	788.301.800,00	0,00	2.613.500,00	6.113.500,00	8.727.000,00	1,11%	-	10,00%	
	<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>			<b>7.436.177.555,00</b>	<b>157.414.425,00</b>	<b>249.690.718,00</b>	<b>773.914.354,00</b>	<b>1.181.019.497,00</b>	<b>15,88%</b>			

Bukittinggi, 27 Maret 2025



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Bukittinggi

**LEDY HERMAWAN, S.T, M.Sc**  
Pembina Tk. I, NIP. 197505212000031003

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

**A. PENDAHULUAN**

**1) Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
4. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dalam rangka percepatan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara terus menerus.

Evaluasi juga digunakan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terarah dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

## **2) Dasar Hukum**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi; dan

13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 3) Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
2. Tersedianya data dan informasi dibidang kepegawaian dan manajemen sumber daya aparatur sipil daerah,
3. Bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan berikutnya,
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD pada akhir tahun.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- namun mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp. 7.362.201.555,- guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2025, yaitu 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang hingga 30 Juni 2025 atau Triwulan II dapat dilihat pencapaian kinerja sebagai berikut :

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.843.499.555,- guna mendukung 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **Monitoring dan Evaluasi:**

Pada program ini anggaran yang telah dapat direalisasikan sebesar 45,40% atau Rp. 2.199.030.621,-.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah dilaksanakan walaupun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan operasional perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Kedepannya perlu diupayakan percepatan terhadap capaian realisasi kinerja dan keuangan sehingga tidak terjadi selisih antara target dan kinerja yang terlalu jauh.

## **2) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.790.400.200,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 (Empat) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan, meliputi:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN,
  - 2) Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK,
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,
  - 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN,
  - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,
2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1) Pengelolaan Mutasi ASN
  - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN



- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 1) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 2) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
  - 3) Pembinaan Disiplin ASN
  - 4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  - 5) Pembinaan Disiplin ASN
  - 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  - 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

#### **Monitoring dan Evaluasi:**

Sebagai bagian dari upaya BKPSDM Kota Bukittinggi dalam melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian maka pada program Kepegawaian Daerah hingga Triwulan II telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 605.423.845,- atau 33,82%, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, telah disusun dokumen formasi kebutuhan pengadaan ASN Kota Bukittinggi, dengan demikian capaian kinerja 25%,
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, pada sub kegiatan ini dilakukan pemberkasan NIP untuk CPNS untuk 47 orang, PPPK tahap I sebanyak 148 orang, PPPK tahap II sebanyak 1 orang, dan PPPK Paruh waktu sebanyak 900 orang, capaian kinerja baru mencapai 35%,
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 25% untuk penerbitan SK pensiun PNS setiap bulannya,
- 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN, capaian kinerja 100% untuk pencairan dana Hibah pada KORPRI, dan hingga saat ini masih berlangsung tahap monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut,
- 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja sebesar 50% yaitu telah dilaksanakan updating data kepegawaian hingga 6 bulan,
- 6) Pengelolaan Mutasi ASN, capaian kinerja sebesar 60% dengan diterbitkannya Rekomendasi untuk Proses Baperjakat atau Penilaian Kinerja Aparatur,
- 7) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, capaian kinerja sebesar 65% yaitu dengan diterbitkannya SK Kenaikan Pangkat PNS setiap bulannya,
- 8) Pengelolaan Promosi ASN, capaian kinerja sebesar 25% yang diperoleh untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilantik,
- 9) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, capaian kinerja sebesar 20% berasal dari ASN 2 (dua) orang Dokter Hewan mengikuti Seminar dan Workshop Veterinary Dermatology yang telah mengikuti peningkatan dan atau pengembangan kapasitas,
- 10) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, capaian kinerja sebesar 85% pemberian bantuan pendidikan untuk 29 orang jenjang pendidikan S1, 25 orang jenjang pendidikan S2 dan 3 orang jenjang pendidikan S3,
- 11) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, capaian kinerja pada kegiatan ini baru mencapai 0% karena terjadinya efisiensi anggaran,

- 12) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja 15% untuk Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi,
- 13) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja masih 0% karena penilaian Sistem Merit tidak dilakukan tahun ini untuk Kota Bukittinggi,
- 14) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 90% berupa pengiriman dokumen SKP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaporkan melalui aplikasi E-Lapkin,
- 15) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, capaian kinerja 0% dikarenakan masih menunggu proses verifikasi berkas pengajuan tanda jasa dari Kementerian Dalam Negeri,
- 16) Pembinaan Disiplin ASN, capaian kinerja sebesar 30% untuk rekomendasi konseling pra nikah dan proses izin cerai yang dikeluarkan,
- 17) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, capaian kinerja 50% atas kasus pelanggaran disiplin ASN,
- 18) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, capaian kinerja 30% karena belum adanya dokumen izin perceraian pegawai yang diproses.

Untuk selanjutnya kiranya perlu dilakukan percepatan terhadap capaian kinerja dan keuangan masing-masing sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### **3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 728.301.800,- digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan,

#### **Monitoring dan Evaluasi :**

Program ini melaksanakan sub kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan berupa pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS untuk formasi STTD, sedangkan pada pendidikan kepemimpinan untuk Diklat Struktural untuk Pim Tk. II dan Pim Tk. III mengalami rasionalisasi anggaran, sehingga capaian kinerja baru sebesar 30% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.721.250,- atau 5,04%.

### **C. KENDALA DAN PENYELESAIAN**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan pada pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumberdaya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, sehingga kebijakan

yang diambil didasarkan pada regulasi dan juga arahan pimpinan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemui kendala yang berarti. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Upaya untuk peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan atau pengembangan kompetensi secara bertahap dapat dilaksanakan antara lain dengan pengiriman ASN mengikuti bimtek, workshop dan pembekalan serta pelaksanaan bimtek yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sendiri dapat dilaksanakan tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang disyaratkan.

Pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, ditargetkan diikuti oleh 49 orang CPNS formasi 2024 dan 2 orang formasi STTD untuk Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS. Untuk pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yaitu Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV tahun ini sesuai arahan pimpinan diadakan. Mengingat kegiatan ini bekerja sama dengan pihak penyelenggara sehingga untuk waktu pelaksanaan harus menyesuaikan dengan jadwal dari pihak penyelenggara. Hal ini tentunya mempengaruhi dalam realisasi anggaran dan juga capaian kinerja.

Adapun terkait pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, baik itu kenaikan pangkat, pengelolaan pensiun, kartu identitas pegawai dan lainnya juga terdapat beberapa perubahan pola pelaksanaan, selain dilakukan melakukan koordinasi secara tatap muka juga dengan pengiriman atau penyampaian dokumen dalam bentuk digital sesuai jadwal waktu yang ditetapkan baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKN Pusat di Jakarta.

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait dengan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah melakukan Koordinasi yang intensif baik dengan Pihak atau instansi Terkait diluar Pemerintah Kota Bukittinggi juga dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan pembinaan kepada aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melalui rapat-rapat internal yang dilaksanakan.

## **D. KEUANGAN**

### **1) Anggaran Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- dan mengalami pergeseran refofusing anggaran menjadi Rp. 7.362.201.555,- guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Persentase	Ket
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	60,72%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.711.632.800,00	36,83%	
	Belanja Hibah	180.000.000,00	2,44%	

Pagu dana yang tersebut terdiri dari Belanja Operasi yang digunakan untuk Belanja Pegawai baik Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah.

## 2) Realisasi Anggaran

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>2.841.175.716,00</b>	<b>38.59%</b>
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>2.841.175.716,00</b>	<b>38.59%</b>
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	2.037.294.797,00	45,57%
	Belanja Barang dan Jasa	2.711.632.800,00	623.880.919,00	23,01%
	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%

Capaian kinerja anggaran sebagaimana tersebut di atas yaitu 38,59%, dikategorikan masih rendah karena masih dibawah 50% untuk Tri Wulan II dan masih dibawah target anggaran kas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada Triwulan II sebesar 74,35%.

Serapan anggaran ini belum memenuhi target Tri Wulan II karena beberapa kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

## E. PENUTUP

### 1) Kesimpulan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sekaligus upaya pencapaian sasaran strategis *Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional*.

Dari 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan yang dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2025, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, meskipun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Sedangkan pencapaian kinerja anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.

2.841.175.716,- atau 38,59%.

Serapan anggaran belum memenuhi target Tri Wulan II disebabkan karena beberapa sub kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

## 2) Saran

Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dapat lebih optimal, kiranya Kasubid/Kasubag dan atau PPTK dapat mempedomani kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan masing-masing sehingga ketepatan waktu dan realisasi anggaran dapat terpenuhi.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II tahun 2025.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**



**TEDY HERMAWAN, S.T, M.Sc**  
Pembina TK. I, NIP. 197505212000031003

**RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITINGGI**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan			TRIWULAN II					Ket
						April	Mei	Juni	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			7.362.201.555,00	1.181.019.497,00	649.288.110,00	495.565.351,00	515.302.758,00	1.660.156.219,00	2.841.175.716,00	38,59%			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			4.843.499.555,00	1.049.410.332,00	298.334.210,00	360.383.814,00	490.902.265,00	1.149.620.289,00	2.199.030.621,00	45,40%			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.580.400,00	0,00	1.990.500,00	0,00	1.765.000,00	3.755.500,00	3.755.500,00	43,77%			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 dokumen	8.580.400,00	0,00	1.990.500,00	0,00	1.765.000,00	3.755.500,00	3.755.500,00	43,77%	3 Dokumen	60,00%	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.568.476.555,00	1.000.507.002,00	279.536.853,00	340.900.258,00	452.111.584,00	1.072.548.695,00	2.073.055.697,00	45,38%			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/ Bulan	4.563.508.755,00	1.000.507.002,00	279.536.853,00	340.900.258,00	451.350.684,00	1.071.787.795,00	2.072.294.797,00	45,41%	6 Bulan	50,00%	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.967.800,00	0,00	0,00	0,00	760.900,00	760.900,00	760.900,00	15,32%	6 Bulan	50,00%	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	7.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.450.500,00	14.572.000,00	4.935.750,00	11.087.750,00	30.117.669,00	46.141.169,00	60.713.169,00	75,47%			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	1.115.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	88,79%	8 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.656.200,00	0,00	0,00	0,00	6.736.710,00	6.736.710,00	6.736.710,00	87,99%	17 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	3.179.300,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	27,52%	2 Paket	50,00%	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.250.000,00	0,00	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00	2.659.000,00	62,56%	1 Laporan	75,00%	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	64.250.000,00	14.572.000,00	2.276.750,00	10.097.750,00	22.505.959,00	34.880.459,00	49.452.459,00	76,97%	1 Laporan	85,00%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.362.000,00	10.142.635,00	195.387,00	129.731,00	105.587,00	430.705,00	10.573.340,00	29,08%			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.362.000,00	9.727.000,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	9.840.500,00	29,50%	1 Laporan	50,00%	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	415.635,00	81.887,00	129.731,00	105.587,00	317.205,00	732.840,00	24,43%	-	50,00%	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			142.582.100,00	24.188.695,00	11.675.720,00	8.266.075,00	6.802.425,00	26.744.220,00	50.932.915,00	35,72%			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.190.000,00	9.023.520,00	3.580.920,00	1.618.400,00	1.036.000,00	6.235.320,00	15.258.840,00	38,94%	6 Bulan/ 1 Unit	50,00%	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	98.500.000,00	12.560.175,00	8.094.800,00	6.415.675,00	5.596.425,00	20.106.900,00	32.667.075,00	33,16%	6 Bulan/ 12 Unit	50,00%	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	2.840.000,00	700.000,00	0,00	232.000,00	170.000,00	402.000,00	1.102.000,00	38,80%	4 Unit	50,00%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan				TRIWULAN II				Ket
						April	Mei	Juni	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.052.100,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	92,83%	3 Unit	100,00%	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>1.790.400.200,00</b>	<b>122.882.165,00</b>	<b>329.800.400,00</b>	<b>130.954.287,00</b>	<b>21.786.993,00</b>	<b>482.541.680,00</b>	<b>605.423.845,00</b>	<b>33,82%</b>			
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>442.120.600,00</b>	<b>50.636.756,00</b>	<b>194.350.000,00</b>	<b>25.884.150,00</b>	<b>14.204.500,00</b>	<b>234.438.650,00</b>	<b>285.075.406,00</b>	<b>64,48%</b>			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	25,00%	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	55.707.400,00	25.185.950,00	900.000,00	10.554.150,00	0,00	11.454.150,00	36.640.100,00	65,77%	-	70,00%	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	12.428.400,00	0,00	450.000,00	1.840.000,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	18,43%	-	25,00%	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	99,77%	1 Lembaga	100,00%	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	183.721.500,00	25.450.806,00	13.000.000,00	13.490.000,00	14.204.500,00	40.694.500,00	66.145.306,00	36,00%	-	50,00%	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>569.632.000,00</b>	<b>37.730.274,00</b>	<b>16.326.900,00</b>	<b>98.702.127,00</b>	<b>6.053.993,00</b>	<b>121.083.020,00</b>	<b>158.813.294,00</b>	<b>27,88%</b>			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelasana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	37.590.400,00	0,00	450.000,00	16.717.107,00	4.194.893,00	21.362.000,00	21.362.000,00	56,83%	-	60,00%	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	73.410.000,00	17.426.750,00	15.876.900,00	2.600.000,00	1.354.500,00	19.831.400,00	37.258.150,00	50,75%	-	65,00%	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	458.631.600,00	20.303.524,00	0,00	79.385.020,00	504.600,00	79.889.620,00	100.193.144,00	21,85%	-	25,00%	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>670.791.600,00</b>	<b>5.556.250,00</b>	<b>118.173.250,00</b>	<b>6.128.210,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>125.829.960,00</b>	<b>131.386.210,00</b>	<b>19,59%</b>			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 Orang	415.586.800,00	5.383.000,00	0,00	5.743.210,00	1.528.500,00	7.271.710,00	12.654.710,00	3,05%	-	20,00%	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	214.673.200,00	173.250,00	118.173.250,00	385.000,00	0,00	118.558.250,00	118.731.500,00	55,31%	57 Orang	65,00%	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	40.531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>107.856.000,00</b>	<b>28.958.885,00</b>	<b>950.250,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.050,00</b>	<b>30.148.935,00</b>	<b>27,95%</b>			
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	6.215.200,00	0,00	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00	239.800,00	3,86%	-	15,00%	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	7.864.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	14.434.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.075,00	83,82%	-	90,00%	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	150 Orang	7.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	38.725.200,00	8.727.000,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	8.840.500,00	22,83%	6 Orang	30,00%	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	7.689.100,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	45,13%	-	50,00%	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan				TRIWULAN II				Ket
						April	Mei	Juni	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	2 Dokumen	22.270.100,00	2.327.810,00	836.750,00	0,00	0,00	836.750,00	3.164.560,00	14,21%	-	30,00%	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			728.301.800,00	8.727.000,00	21.153.500,00	4.227.250,00	2.613.500,00	27.994.250,00	36.721.250,00	5,04%			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			728.301.800,00	8.727.000,00	21.153.500,00	4.227.250,00	2.613.500,00	27.994.250,00	36.721.250,00	5,04%			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			728.301.800,00	8.727.000,00	21.153.500,00	4.227.250,00	2.613.500,00	27.994.250,00	36.721.250,00	5,04%			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	728.301.800,00	8.727.000,00	21.153.500,00	4.227.250,00	2.613.500,00	27.994.250,00	36.721.250,00	5,04%	-	30,00%	
	JUMLAH TOTAL BELANJA			7.362.201.555,00	1.181.019.497,00	649.288.110,00	495.565.351,00	515.302.758,00	1.660.156.219,00	2.841.175.716,00	38,59%			

Bukittinggi, 30 Juni 2025

Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Bukittinggi

  
**CEDY HERMAWAN, S.T. M.Sc**  
Pamula Tk. I, NIP. 197505212000031003



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

**A. PENDAHULUAN**

**1) Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, adalah:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
4. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dalam rangka percepatan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara terus menerus.

Evaluasi juga digunakan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terarah dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

## **2) Dasar Hukum**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi; dan

13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 3) Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini, adalah:

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
2. Tersedianya data dan informasi dibidang kepegawaian dan manajemen sumber daya aparatur sipil daerah,
3. Bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan berikutnya,
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD pada akhir tahun.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- namun mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp. 7.362.201.555,- guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2025, yaitu 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang hingga 30 September 2025 atau Triwulan III dapat dilihat pencapaian kinerja, sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.843.499.555,- guna mendukung 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Monitoring dan Evaluasi :**

Pada program ini anggaran yang telah dapat direalisasikan sebesar 67,77% atau Rp. 3.282.314.552,-.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah dilaksanakan, dan hampir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 75%. Hal ini dikarenakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan operasional perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi yang sifatnya insidentil. Kedepannya perlu diupayakan percepatan terhadap capaian realisasi kinerja dan keuangan sehingga tidak terjadi selisih antara target dan kinerja yang terlalu jauh.

**2) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.790.400.200,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 (Empat) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan, meliputi :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN,
  - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS Dan PPPK,
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,
  - 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN,
  - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,
2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1) Pengelolaan Mutasi ASN
  - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 1) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 2) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
  - 3) Pembinaan Disiplin ASN
  - 4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  - 5) Pembinaan Disiplin ASN
  - 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  - 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

**Monitoring dan Evaluasi :**

Sebagai bagian dari upaya BKPSDM Kota Bukittinggi dalam melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian maka pada program Kepegawaian Daerah hingga Triwulan III Tahun 2025 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.055.635.395,- atau 58,96%, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, telah disusun dokumen formasi kebutuhan pengadaan ASN Kota Bukittinggi, dengan demikian capaian kinerja 50%,
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, pada sub kegiatan ini dilakukan pemberkasan NIP untuk CPNS untuk 47 orang, PPPK tahap I sebanyak 148 orang, PPPK tahap II sebanyak 1 orang, dan PPPK Paruh waktu sebanyak 900 orang, capaian kinerja baru mencapai 80%,
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 50% untuk penerbitan SK pensiun PNS setiap bulannya,
- 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN, capaian kinerja 100% untuk pencairan dana Hibah pada KORPRI, dan hingga saat ini masih berlangsung tahap monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut,
- 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja sebesar 75% yaitu telah dilaksanakan updating data kepegawaian hingga 9 bulan,
- 6) Pengelolaan Mutasi ASN, capaian kinerja sebesar 75% dengan diterbitkannya Rekomendasi untuk Proses Baperjakat atau Penilaian Kinerja Aparatur,
- 7) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, capaian kinerja sebesar 75% yaitu dengan diterbitkannya SK Kenaikan Pangkat PNS setiap bulannya,
- 8) Pengelolaan Promosi ASN, capaian kinerja sebesar 60% yang diperoleh untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilantik,
- 9) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, capaian kinerja sebesar 90% berasal dari kegiatan 36 orang Bendahara dan 20 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mengikuti Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diikuti,
- 10) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, capaian kinerja sebesar 85% untuk realisasi bantuan pendidikan,
- 11) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 10% karena terjadinya efisiensi anggaran,
- 12) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja 30% untuk

- Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi,
- 13) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja 30% untuk dokumen pelaksanaan Sistem Merit,
  - 14) Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 90% berupa pengiriman dokumen SKP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaporkan melalui aplikasi E-Lapkin,
  - 15) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, capaian kinerja 25% dikarenakan masih menunggu proses verifikasi berkas pengajuan tanda jasa dari Kementerian Dalam Negeri,
  - 16) Pembinaan Disiplin ASN, capaian kinerja sebesar 30% untuk rekomendasi konseling pra nikah dan proses izin cerai yang dikeluarkan,
  - 17) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, capaian kinerja sudah mencapai 50% untuk rekomendasi yang diterbitkan atas kasus pelanggaran disiplin ASN,
  - 18) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, capaian kinerja 30% yaitu dengan dikeluarkannya dokumen izin perceraian pegawai yang diproses.

Untuk selanjutnya kiranya perlu dilakukan percepatan terhadap capaian kinerja dan keuangan masing-masing sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### **3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 728.301.800,- digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan,

#### **Monitoring dan Evaluasi :**

Program ini melaksanakan sub kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan berupa pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS untuk formasi STTD, sedangkan pada pendidikan kepemimpinan untuk Diklat Struktural untuk Pim Tk. II dan Pim Tk. III mengalami rasionalisasi anggaran, sehingga capaian kinerja baru sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 294.967.050,- atau 40,50%.

### **C. KENDALA DAN PENYELESAIAN**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan pada pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumberdaya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, sehingga kebijakan yang diambil didasarkan pada regulasi dan juga arahan pimpinan.



Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemui kendala yang berarti. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Upaya untuk peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan atau pengembangan kompetensi secara bertahap dapat dilaksanakan antara lain dengan pengiriman ASN mengikuti bimtek, workshop dan pembekalan serta pelaksanaan bimtek yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sendiri yang dilaksanakan tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang disyaratkan.

Terkait pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, baik itu kenaikan pangkat, pengelolaan pensiun, kartu identitas pegawai dan lainnya juga terdapat beberapa perubahan pola pelaksanaan, selain dilakukan melakukan koordinasi secara tatap muka juga dengan pengiriman atau penyampaian dokumen dalam bentuk digital sesuai jadwal waktu yang ditetapkan baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKN Pusat di Jakarta.

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait dengan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah melakukan Koordinasi yang intensif baik dengan Pihak atau instansi Terkait diluar Pemerintah Kota Bukittinggi juga dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan pembinaan kepada aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melalui rapat-rapat internal yang dilaksanakan.

#### **D. KEUANGAN**

##### **1) Anggaran Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- dan mengalami pergeseran reconfusing anggaran menjadi Rp. 7.362.201.555,- guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, terdiri dari :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>Ket</b>
<b>I.</b>	<b>Belanja</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	60,72%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.711.632.800,00	36,83%	
	Belanja Hibah	180.000.000,00	2,44%	

Pagu dana yang tersebut terdiri dari Belanja Operasi yang digunakan untuk Belanja Pegawai baik Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah.

## 2) Realisasi Anggaran

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>4.632.916.997,00</b>	<b>62.93%</b>
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.362.201.555,00</b>	<b>4.632.916.997,00</b>	<b>62.93%</b>
	Belanja Pegawai	4.470.568.755,00	3.050.987.583,00	68,25%
	Belanja Barang dan Jasa	2.711.632.800,00	1.401.929.414,0	51,70%
	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%

Capaian kinerja anggaran sebagaimana tersebut di atas yaitu 62,93%, dikategorikan rendah, karena sesuai dengan anggaran kas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada Triwulan III sebesar 89,16%.

Rendahnya serapan anggaran pada Triwulan III ini antara lain karena beberapa kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

## E. PENUTUP

### 1) Kesimpulan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sekaligus upaya pencapaian sasaran strategis *Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional*.

Dari 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan yang dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2025, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, meskipun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Sedangkan pencapaian kinerja anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 4.632.916.997,- atau 62,93%.

Rendahnya serapan anggaran disebabkan antara lain : beberapa sub kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, perubahan pola dan jadwal pelaksanaan, belum selesainya administrasi kegiatan dan keuangan serta adanya regulasi atau kebijakan lebih lanjut sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

### 2) Saran

Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dapat lebih optimal, kiranya Kasubid/Kasubag dan atau PPTK dapat mempedomani kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan masing-masing sehingga ketepatan waktu dan realisasi anggaran dapat terpenuhi.

Disamping itu kiranya perlu dihitung kembali belanja atau pagu anggaran masing-masing sub kegiatan mengingat tahun anggaran kurang dari 3 (Tiga) bulan lagi untuk menghindari terjadinya SiLPA pada akhir tahun 2025.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan III tahun 2025.

Bukittinggi, 30 September 2025

**PI. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**



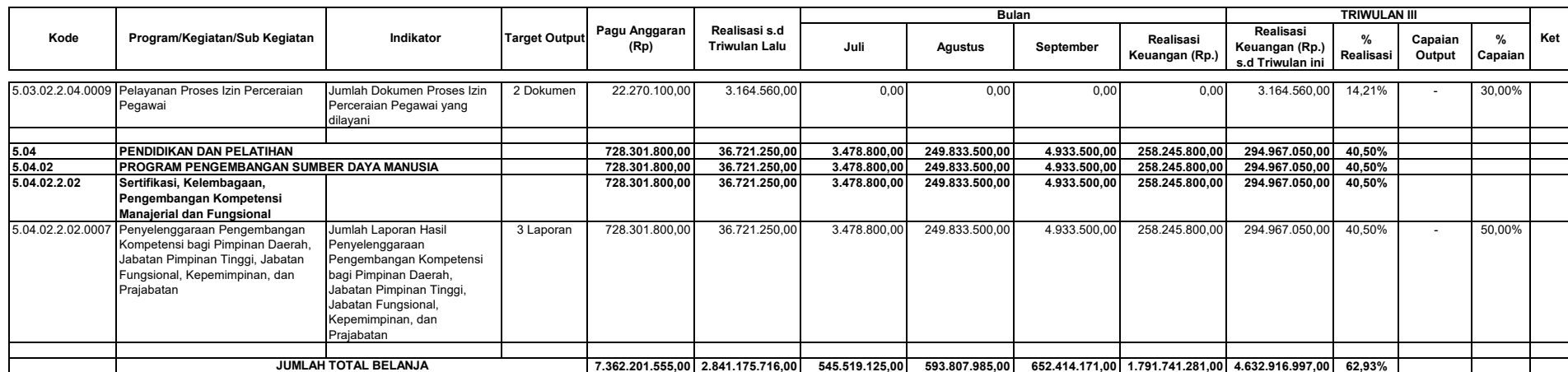
**INDRA HARTATI, SKM, M.Si**

Pembina Tk. I, NIP. 197503282000032003

**RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITINGGI**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan			TRIWULAN III					Ket
						Juli	Agustus	September	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			7.362.201.555,00	2.841.175.716,00	545.519.125,00	593.807.985,00	652.414.171,00	1.791.741.281,00	4.632.916.997,00	62,93%			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			4.843.499.555,00	2.199.030.621,00	459.669.075,00	313.709.235,00	309.905.621,00	1.083.283.931,00	3.282.314.552,00	67,77%			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.580.400,00	3.755.500,00	641.100,00	1.460.000,00	0,00	2.101.100,00	5.856.600,00	68,26%			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 dokumen	8.580.400,00	3.755.500,00	641.100,00	1.460.000,00	0,00	2.101.100,00	5.856.600,00	68,26%	4 Dokumen	75,00%	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.568.476.555,00	2.073.055.697,00	443.267.702,00	302.891.534,00	299.916.050,00	1.046.075.286,00	3.119.130.983,00	68,28%			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/ Bulan	4.563.508.755,00	2.072.294.797,00	443.267.702,00	302.891.534,00	299.916.050,00	1.046.075.286,00	3.118.370.083,00	68,33%	9 Bulan	75,00%	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.967.800,00	760.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.900,00	25,00%	9 Bulan	75,00%	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	7.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.450.500,00	60.713.169,00	7.302.505,00	0,00	766.500,00	8.069.005,00	68.782.174,00	85,50%			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	1.115.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	88,79%	8 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.656.200,00	6.736.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.710,00	87,99%	17 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	3.179.300,00	875.000,00	0,00	0,00	766.500,00	766.500,00	1.641.500,00	51,63%	3 Paket	75,00%	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.250.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00	62,56%	-	75,00%	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	64.250.000,00	49.452.459,00	7.302.505,00	0,00	0,00	7.302.505,00	56.754.964,00	88,33%	-	90,00%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.362.000,00	10.573.340,00	0,00	174.801,00	106.671,00	281.472,00	10.854.812,00	29,85%			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.362.000,00	9.840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.500,00	29,50%	-	85,00%	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	732.840,00	0,00	174.801,00	106.671,00	281.472,00	1.014.312,00	33,81%	-	75,00%	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			142.582.100,00	50.932.915,00	8.457.768,00	9.182.900,00	9.116.400,00	26.757.068,00	77.689.983,00	54,49%			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.190.000,00	15.258.840,00	2.047.318,00	943.200,00	0,00	2.990.518,00	18.249.358,00	46,57%	9 Bulan/ 1 Unit	75,00%	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	98.500.000,00	32.667.075,00	6.207.850,00	7.859.700,00	9.116.400,00	23.183.950,00	55.851.025,00	56,70%	9 Bulan/ 12 Unit	75,00%	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva yang dinelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnva yang dinelihara	20 Unit	2.840.000,00	1.102.000,00	202.600,00	380.000,00	0,00	582.600,00	1.684.600,00	59,32%	8 Unit	75,00%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan				TRIWULAN III				Ket
						Juli	Agustus	September	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	2.052.100,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	92,83%	14 Unit	100,00%	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>1.790.400.200,00</b>	<b>605.423.845,00</b>	<b>82.371.250,00</b>	<b>30.265.250,00</b>	<b>337.575.050,00</b>	<b>450.211.550,00</b>	<b>1.055.635.395,00</b>	<b>58,96%</b>			
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>442.120.600,00</b>	<b>285.075.406,00</b>	<b>3.824.500,00</b>	<b>26.649.750,00</b>	<b>15.381.500,00</b>	<b>45.855.750,00</b>	<b>330.931.156,00</b>	<b>74,85%</b>			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.843.500,00	0,00	2.674.500,00	0,00	594.000,00	3.268.500,00	3.268.500,00	33,20%	-	50,00%	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	55.707.400,00	36.640.100,00	0,00	649.750,00	1.787.500,00	2.437.250,00	39.077.350,00	70,15%	-	80,00%	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	12.428.400,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	18,43%	-	50,00%	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	99,77%	1 Lembaga	100,00%	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	183.721.500,00	66.145.306,00	1.150.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	40.150.000,00	106.295.306,00	57,86%	-	75,00%	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>569.632.000,00</b>	<b>158.813.294,00</b>	<b>48.606.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.193.550,00</b>	<b>117.800.500,00</b>	<b>276.613.794,00</b>	<b>48,56%</b>			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelasana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	37.590.400,00	21.362.000,00	3.665.600,00	0,00	687.600,00	4.353.200,00	25.715.200,00	68,41%	-	75,00%	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	73.410.000,00	37.258.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	38.758.150,00	52,80%	-	75,00%	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	458.631.600,00	100.193.144,00	43.441.350,00	0,00	68.505.950,00	111.947.300,00	212.140.444,00	46,26%	1 Dokumen	60,00%	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>670.791.600,00</b>	<b>131.386.210,00</b>	<b>28.798.800,00</b>	<b>3.615.500,00</b>	<b>253.000.000,00</b>	<b>285.414.300,00</b>	<b>416.800.510,00</b>	<b>62,14%</b>			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 Orang	415.586.800,00	12.654.710,00	0,00	3.615.500,00	251.476.000,00	255.091.500,00	267.746.210,00	64,43%	80 Orang	90,00%	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	214.673.200,00	118.731.500,00	28.798.800,00	0,00	1.524.000,00	30.322.800,00	149.054.300,00	69,43%	57 Orang	85,00%	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	35 Orang	40.531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	10,00%	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>107.856.000,00</b>	<b>30.148.935,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>31.289.935,00</b>	<b>29,01%</b>			
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	6.215.200,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.800,00	3,86%	-	30,00%	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	7.864.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	30,00%	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	14.434.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.075,00	83,82%	-	90,00%	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	150 Orang	7.871.400,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	14,50%	-	25,00%	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	38.725.200,00	8.840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.500,00	22,83%	6 Orang	30,00%	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	7.689.100,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	45,13%	-	50,00%	



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

**A. PENDAHULUAN**

**1) Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka terdapat perubahan atau penyederhanaan struktur organisasi pada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat perubahan susunan organisasi pada jabatan pengawas, sehingga menjadi:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Data, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur,  
Pada Bidang Data, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur penyetaraan jabatan pada kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Formasi,
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan dan Pemberhentian,
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi, Jabatan dan Kepangkatan,
4. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Aparatur,  
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Aparatur memiliki kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional-Sub-Substansi Pembinaan Aparatur,
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional-Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi dan



Kesejahteraan,

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional-Sub-Substansi Pendidikan dan Pelatihan,
5. UPTD.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, adalah:

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
4. Penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Meskipun terdapat perubahan susunan organisasi pada jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional namun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaporkan ini tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang masih dikelola oleh Bidang atau sub bidang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam rangka percepatan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, perbaikan dan peningkatan kualitas dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara terus menerus.

Evaluasi juga digunakan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terarah dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sebagai bentuk konsistensi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

## 1) Dasar Hukum

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## 2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini, adalah:

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
2. Tersedianya data dan informasi dibidang kepegawaian dan manajemen sumber daya aparatur sipil daerah,
3. Bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan berikutnya,
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD pada akhir tahun.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.362.201.555,- guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi. Selanjutnya terbitnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menjadi menjadi Rp. 7.555.494.363,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan rincian, sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.903.083.663,- guna mendukung 6 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp. 4.507.919.248,- atau sebesar 91,94%. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan operasional perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi yang sifatnya insidental.

## **2) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.316.514.200,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 (Empat) kegiatan dan 18 (Delapan belas), sub kegiatan meliputi:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN
  - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1) Pengelolaan Mutasi ASN
  - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan fungsional
4. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 4) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- 5) Pembinaan Disiplin ASN
- 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditujukan untuk Peningkatan kualitas aparatur sipil Negara dan juga Peningkatan kualitas layanan administrasi Kepegawaian aparatur sipil Negara dengan realisasi sebesar Rp. 1.789.618.125,- atau sebesar 77,25%.

Peningkatan kualitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi ASN sedangkan Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian ASN melalui layanan administrasi kepegawaian dari fasilitasi pengadaan ASN, proses mutasi dan promosi serta kenaikan pangkat PNS serta penilaian dan evaluasi kinerja.

### **3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 335.896.500,-, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditujukan untuk Peningkatan kualitas aparatur sipil Negara melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pengiriman peserta pendidikan dan latihan dasar CPNS serta pendidikan dan latihan kepemimpinan bagi pejabat struktural dengan realisasi sebesar Rp. 313.456.448,- atau sebesar 93,32%.

## **C. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan hingga akhir tahun 2025 adalah, sebagaimana uraian berikut:

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.903.083.663,- guna mendukung 6 Kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar 91,94% atau Rp. 4.507.919.248,-, adapun kegiatannya adalah, sebagai berikut:

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari target 5 dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun telah dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja 100%,

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja dapat direalisasikan 100% untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan,
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, telah tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD selama 12 bulan,
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas, kegiatan tidak terlaksana dikarenakan tidak ada kasus pegawai yang meninggal saat melaksanakan tugas sehingga capaian kinerja 0% namun anggaran bersifat insidental,
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari target 8 paket komponen instalasi listrik/penerangan dapat direalisasikan sebanyak 8 paket dengan capaian kinerja 100%,
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari target 8 jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dapat direalisasikan sebanyak 7 paket dengan capaian kinerja 97%, hal ini disebabkan karena belanja alat perekam yang direncanakan dan sesuai spesifikasi di DPA tidak tersedia atau diproduksi lagi di pasaran, sehingga pembelian tidak dapat dilakukan,
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari 17 paket item alat tulis kantor yang disediakan dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja 100%,
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari 5 paket barang cetak yang disediakan dan 12 bulan Penggandaan yang disediakan telah dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja 100%,
  - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu, indikator sub kegiatan adalah makan dan minum tamu yang disediakan untuk 12 bulan dapat terealisasi 96%,
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari 12 bulan target penyediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan, lembur serta biaya rapat koordinasi, konsultasi, diklat/bimtek dan perjalanan tugas kedinasan lainnya dapat direalisasikan 98%.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatannya:
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dapat direalisasikan dengan capaian 100%,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah rekening telepon yang dibayarkan adalah 1 rekening selama 12 bulan sehingga capaian kinerja 100%,
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara selama 12 bulan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja 95%,
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja 100%,

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari 11 (sebelas) unit peralatan dan mesin yang dipelihara dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja 98%,
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari 14 (empat belas) unit peralatan kebersihan yang disediakan dapat dilaksanakan sehingga capaian kinerja 100%.

## **2) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.316.514.200,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 (Empat) kegiatan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.789.618.125,- atau 77,25%, adapun kegiatan yang terdapat pada program ini, adalah:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, telah disusun dokumen formasi kebutuhan pengadaan ASN Kota Bukittinggi, dengan demikian capaian kinerja 98%,
  - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, pada sub kegiatan ini dilakukan pemberkasan NIP untuk CPNS untuk 47 orang, PPPK tahap I sebanyak 148 orang, PPPK tahap II sebanyak 1 orang, dan PPPK Paruh waktu sebanyak 900 orang, capaian kinerja baru mencapai 100%,
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 95% yaitu dengan telah diterbitkannya 89 SK pensiun PNS,
  - 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN, capaian kinerja 85% yaitu Laporan pemberian Hibah pada KORPRI, sedangkan realisasi keuangan sebesar 57,84%,
  - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja sebesar 100% yaitu telah dilaksanakan updating data kepegawaian hingga 12 bulan,
2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
  - 1) Pengelolaan Mutasi ASN, capaian kinerja sebesar 100% yaitu telah diterbitkannya rekomendasi mutasi pegawai selama tahun 2025 yang terlaksana sesuai dengan usulan baik untuk jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana termasuk mutasi pindah antar instansi,
  - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, capaian kinerja sebesar 100% yaitu dengan diterbitkannya 482 SK Kenaikan Pangkat PNS, 21 SK bulan Februari, 243 SK bulan April, 32 SK bulan Juni, 49 SK bulan Agustus, 87 SK bulan Oktober dan 50 SK bulan Desember,
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN, capaian kinerja sebesar 97% dimana telah diterbitkannya rekomendasi promosi pegawai selama tahun 2025 yang terlaksana sesuai dengan usulan yang diajukan.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:
  - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, capaian kinerja sebesar 129% berasal dari 258 orang ASN yang telah mengikuti peningkatan dan atau pengembangan kapasitas melalui diklat khusus, bimtek dan kegiatan sejenisnya, yaitu 2 orang Dokter Hewan mengikuti Seminar dan Workshop Veterinary Dermatology, 36 orang Bendahara dan 20 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mengikuti Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, serta 200 orang PPPK mengikuti Diklat Orientasi Klasikal,
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, capaian kinerja sebesar 100% bantuan pendidikan untuk untuk 29 orang jenjang pendidikan S1, 25 orang jenjang pendidikan S2 dan 3 orang jenjang pendidikan S3,
  - 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, capaian kinerja sebesar 65%, karena kegiatan ini mengalami rasionalisasi pada perubahan anggaran.
4. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 80% karena perubahan aturan untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2025 masih menunggu jadwal harmonisasi dari Kemenkumham, diperkirakan Peraturan Walikota Bukittinggi ini akan rampung pada Tahun 2026 mendatang,
  - 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 90% dimana pada Tahun 2025 belum ada Penilaian Merit Sistem, karena masih dalam tahap penyusunan peraturan terbaru sesuai dengan Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk lembaga independen yang memiliki mandat mengawasi penerapan sistem merit serta perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu paling lama dua tahun,
  - 3) Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 100% berupa pengiriman dokumen SKP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 2721 dokumen SKP PNS yang dilaporkan melalui aplikasi E-Lapkin,
  - 4) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, capaian kinerja sebesar 101,82% sebanyak 112 orang Aparatur yang menerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS), untuk 53 orang masa pengabdian 10 tahun, 33 orang masa pengabdian 20 tahun dan 26 orang masa pengabdian 30 tahun,
  - 5) Pembinaan Disiplin ASN, capaian kinerja sebesar 156% berupa 39 rekomendasi yang dikeluarkan untuk konseling pra nikah, dan pelaksanaan Inspeksi Mendadak ke SKPD terkait kedisiplinan pegawai,
  - 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, capaian kinerja adalah 90%, kepada 20 orang kasus pelanggaran disiplin ASN yang sedang diproses,
  - 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, capaian kinerja sebesar 90%, yaitu dengan dikeluarkannya 9 dokumen izin perceraian pegawai yang diproses.



### 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia telah disediakan dana untuk mendukung program ini sebesar Rp. 335.896.500,- dengan kegiatan, sebagai berikut:

#### 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, dengan indikator:
  - Jumlah CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar sebanyak 51 orang dari CPNS umum dan STTD formasi Tahun 2024,
  - Untuk Diklat Struktural PIM IV/PKP, PIM III/PKA dan PIM II/PKN untuk Tahun 2025 sesuai arahan pimpinan tidak dilaksanakan sehingga anggaran dirasionalisasi,
  - Sehingga capaian kinerja sebesar 100% untuk pelaksanaan Latsar CPNS, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 313.456.448,- atau 93,32%.

Dari uraian terhadap pelaksanaan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan bahkan terdapat sub kegiatan yang melebihi target.

### D. KENDALA DAN PENYELESAIAN

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan pada pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumberdaya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya dalam upaya *Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional* sebagai Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, sehingga kebijakan yang diambil didasarkan pada regulasi dan juga arahan pimpinan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemui kendala yang berarti. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan terdapat sub kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan.

Upaya untuk peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan atau pengembangan kompetensi secara bertahap dapat dilaksanakan antara lain dengan pengiriman ASN mengikuti bimtek, workshop dan pembekalan serta pelaksanaan bimtek yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sedangkan upaya peningkatan layanan administrasi kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, baik itu kenaikan pangkat, pengelolaan pensiun, kartu identitas pegawai dan lainnya juga terdapat beberapa perubahan pola pelaksanaan, selain dilakukan melakukan koordinasi secara tatap muka juga dengan pengiriman atau penyampaian dokumen dalam bentuk digital sesuai jadwal waktu yang ditetapkan baik ke BKN Regional XII Pekanbaru maupun ke BKN Pusat di Jakarta serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Komisi Aparatur Sipil

Negara. Disamping upaya penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan terus diupayakan untuk dilengkapi dan ditingkatkan kapasitasnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait dengan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah melakukan Koordinasi yang intensif baik dengan Pihak atau instansi Terkait diluar Pemerintah Kota Bukittinggi juga melakukan *coaching clinic* dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait aturan dan regulasi baru yang perlu diketahui oleh ASN dan pembinaan kepada aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melalui rapat-rapat internal yang dilaksanakan.

## E. KEUANGAN

### 1) Anggaran Kegiatan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.436.177.555,- kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, terdapat penambahan dana sebesar Rp. 119.316.808,- sehingga pagu anggaran yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menjadi Rp. 7.555.494.363,- guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yang dibedakan menjadi Belanja Operasi yang digunakan untuk Belanja Pegawai baik Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Modal. Adapun uraian anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Persentase	Ket
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.555.494.363,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.429.377.363,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Belanja Pegawai	4.332.343.363,00	58,31%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.917.034.000,00	39,26%	
	Belanja Hibah	180.000.000,00	2,42%	
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>126.117.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.117.000,00	100,00%	

### 2) Realisasi Anggaran

Hingga akhir Tahun 2025, Realisasi Anggaran yang dapat diserap adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I.	<b>Belanja</b>	<b>7.555.494.363,00</b>	<b>6.610.993.821,00</b>	<b>87,50%</b>
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.429.377.363,00</b>	<b>6.499.268.823,00</b>	<b>87,48%</b>
	Belanja Pegawai	4.332.343.363,00	4.039.342.066,00	93,24%
	Belanja Barang dan Jasa	2.917.034.000,00	2.355.567.031,00	80,75%
	Belanja Hibah	180.000.000,00	104.359.726,00	57,98%
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>126.117.000,00</b>	<b>111.724.998,00</b>	<b>88,59%</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.117.000,00	111.724.998,00	88,59%

Capaian kinerja anggaran sebagaimana tersebut di atas yaitu 87,50%, dikategorikan Baik, walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi keuangan Tahun 2024 yang mencapai 94,15%, atau terdapat penurunan sebesar 5,56%.

Peningkatan capaian keuangan tidak lepas dari dukungan dan komitmen seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja lebih baik serta arahan dari pimpinan.

## F. PENUTUP

### 1) Kesimpulan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan peningkatan serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sekaligus upaya pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yaitu *Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional*.

Dari 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir Tahun 2025, secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan bahkan terdapat capaian kinerja yang melebihi target.

Sedangkan pencapaian kinerja anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.610.993.821,- atau 87,50% dimana mengalami sedikit penurunan dari capaian Tahun 2024.

Peningkatan capaian anggaran ini keseluruhan tidak terlepas dari komitmen seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja lebih baik.

### 2) Saran

Untuk kedepan, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dapat lebih optimal, kiranya Kasubid/Kasubag dan atau PPTK dapat mempedomani kerangka acuan kerja sub kegiatan masing-masing sehingga ketepatan waktu dan realisasi anggaran dapat terpenuhi.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga akhir Tahun 2025.

Bukittinggi, 31 Desember 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI**

**INDRA HARTATI, SKM, M.Si**  
Pembina Tk. I, NIP. 197503282000032003

**RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan			Realisasi Keuangan (Rp.)	TRIWULAN IV				Ket
						Oktober	November	Desember		Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			7.555.494.363,00	4.632.916.997,00	328.364.817,00	497.926.614,00	1.151.785.393,00	1.978.076.824,00	6.610.993.821,00	87,50%			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			4.903.083.663,00	3.282.314.552,00	293.333.017,00	337.556.825,00	594.714.854,00	1.225.604.696,00	4.507.919.248,00	91,94%			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.180.400,00	5.856.600,00	0,00	7.481.700,00	3.074.900,00	10.556.600,00	16.413.200,00	90,28%			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 dokumen	18.180.400,00	5.856.600,00	0,00	7.481.700,00	3.074.900,00	10.556.600,00	16.413.200,00	90,28%	5 Dokumen	100,00%	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.450.486.163,00	3.119.130.983,00	279.159.445,00	307.558.163,00	440.358.875,00	1.027.076.483,00	4.146.207.466,00	93,16%			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	39 Orang/ Bulan	4.442.743.363,00	3.118.370.083,00	277.479.445,00	305.878.163,00	437.746.875,00	1.021.104.483,00	4.139.474.566,00	93,17%	12 Bulan	100,00%	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	7.742.800,00	760.900,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.612.000,00	5.972.000,00	6.732.900,00	86,96%	12 Laporan	100,00%	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	10.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			247.824.000,00	68.782.174,00	0,00	2.156.000,00	142.816.996,00	144.972.996,00	213.755.170,00	86,25%			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	1.115.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	88,79%	8 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	126.117.000,00	0,00	0,00	0,00	111.724.998,00	111.724.998,00	111.724.998,00	88,59%	7 Paket	97,00%	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	7.656.200,00	6.736.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.710,00	87,99%	17 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	5 Paket	5.935.800,00	1.641.500,00	0,00	0,00	3.992.500,00	3.992.500,00	5.634.000,00	94,92%	5 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.250.000,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00	62,56%	1 Laporan	96,00%	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	102.750.000,00	56.754.964,00	0,00	2.156.000,00	27.099.498,00	29.255.498,00	86.010.462,00	83,71%	1 Laporan	98,00%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.840.500,00	10.854.812,00	91.972,00	89.262,00	95.283,00	276.517,00	11.131.329,00	86,69%			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.840.500,00	9.840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.500,00	100,00%	1 Laporan	100,00%	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	1.014.312,00	91.972,00	89.262,00	95.283,00	276.517,00	1.290.829,00	43,03%	1 Laporan	100,00%	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			163.704.600,00	77.689.983,00	14.081.600,00	20.271.700,00	8.368.800,00	42.722.100,00	120.412.083,00	73,55%			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.442.500,00	18.249.358,00	1.280.000,00	3.542.000,00	538.000,00	5.360.000,00	23.609.358,00	42,58%	1 Unit	95,00%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan				TRIWULAN IV				Ket
						Oktober	November	Desember	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	98.500.000,00	55.851.025,00	12.421.600,00	15.683.700,00	5.800.800,00	33.906.100,00	89.757.125,00	91,12%	13 Unit	100,00%	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit	7.710.000,00	1.684.600,00	380.000,00	1.046.000,00	2.030.000,00	3.456.000,00	5.140.600,00	66,67%	11 Unit	98,00%	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	2.052.100,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	92,83%	14 Unit	100,00%	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>2.316.514.200,00</b>	<b>1.055.635.395,00</b>	<b>32.418.300,00</b>	<b>156.360.289,00</b>	<b>545.204.141,00</b>	<b>733.982.730,00</b>	<b>1.789.618.125,00</b>	<b>77,25%</b>			
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>481.570.600,00</b>	<b>330.931.156,00</b>	<b>15.486.700,00</b>	<b>57.972.409,00</b>	<b>-37.321.438,00</b>	<b>36.137.671,00</b>	<b>367.068.827,00</b>	<b>76,22%</b>			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	24.843.500,00	3.268.500,00	0,00	15.564.000,00	1.995.524,00	17.559.524,00	20.828.024,00	83,84%	1 Dokumen	98,00%	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	81.157.400,00	39.077.350,00	2.486.700,00	19.603.550,00	7.871.100,00	29.961.350,00	69.038.700,00	85,07%	1 Dokumen	100,00%	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	21.428.400,00	2.290.000,00	0,00	1.900.000,00	2.269.950,00	4.169.950,00	6.459.950,00	30,15%	1 Dokumen	95,00%	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	180.000.000,00	0,00	0,00	-75.640.274,00	-75.640.274,00	104.359.726,00	57,84%	1 Lembaga	85,00%	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	173.721.500,00	106.295.306,00	13.000.000,00	20.904.859,00	26.182.262,00	60.087.121,00	166.382.427,00	95,78%	1 Dokumen	100,00%	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>778.824.000,00</b>	<b>276.613.794,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>97.119.880,00</b>	<b>208.780.180,00</b>	<b>306.800.060,00</b>	<b>583.413.854,00</b>	<b>74,91%</b>			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelasana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	62.132.900,00	25.715.200,00	900.000,00	18.361.180,00	10.501.660,00	29.762.840,00	55.478.040,00	89,29%	1 Dokumen	100,00%	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	79.152.000,00	38.758.150,00	0,00	7.668.000,00	19.684.600,00	27.352.600,00	66.110.750,00	83,52%	1 Dokumen	100,00%	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	637.539.100,00	212.140.444,00	0,00	71.090.700,00	178.593.920,00	249.684.620,00	461.825.064,00	72,44%	1 Dokumen	97,00%	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>945.444.600,00</b>	<b>416.800.510,00</b>	<b>11.064.800,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>343.052.775,00</b>	<b>355.385.575,00</b>	<b>772.186.085,00</b>	<b>81,67%</b>			
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	791.739.800,00	267.746.210,00	10.874.800,00	1.268.000,00	340.690.520,00	352.833.320,00	620.579.530,00	78,38%	258 Orang	129,00%	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	57 Orang	153.173.200,00	149.054.300,00	0,00	0,00	2.244.595,00	2.244.595,00	151.298.895,00	98,78%	57 Orang	100,00%	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Orang	531.600,00	0,00	190.000,00	0,00	117.660,00	307.660,00	307.660,00	57,87%	0 Orang	65,00%	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>110.675.000,00</b>	<b>31.289.935,00</b>	<b>4.966.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.692.624,00</b>	<b>35.659.424,00</b>	<b>66.949.359,00</b>	<b>60,49%</b>			
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	6.215.200,00	239.800,00	960.000,00	0,00	1.814.100,00	2.774.100,00	3.013.900,00	48,49%	-	80,00%	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	7.864.600,00	0,00	490.000,00	0,00	3.793.660,00	4.283.660,00	4.283.660,00	54,47%	1 Dokumen	90,00%	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	14.434.075,00	908.600,00	0,00	161.505,00	1.070.105,00	15.504.180,00	90,03%	1 Laporan	100,00%	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	110 Orang	20.871.400,00	1.141.000,00	331.000,00	0,00	12.573.990,00	12.904.990,00	14.045.990,00	67,30%	112 Orang	101,82%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Bulan				TRIWULAN IV				Ket
						Oktober	November	Desember	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.) s.d Triwulan ini	% Realisasi	Capaian Output	% Capaian	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	23.544.200,00	8.840.500,00	1.329.100,00	0,00	3.116.130,00	4.445.230,00	13.285.730,00	56,43%	39 Orang	156,00%	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	12.689.100,00	3.470.000,00	948.100,00	0,00	1.457.315,00	2.405.415,00	5.875.415,00	46,30%	1 Laporan	90,00%	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1 Dokumen	22.270.100,00	3.164.560,00	0,00	0,00	7.775.924,00	7.775.924,00	10.940.484,00	49,13%	1 Dokumen	90,00%	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			335.896.500,00	294.967.050,00	2.613.500,00	4.009.500,00	11.866.398,00	18.489.398,00	313.456.448,00	93,32%			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			335.896.500,00	294.967.050,00	2.613.500,00	4.009.500,00	11.866.398,00	18.489.398,00	313.456.448,00	93,32%			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			335.896.500,00	294.967.050,00	2.613.500,00	4.009.500,00	11.866.398,00	18.489.398,00	313.456.448,00	93,32%			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	335.896.500,00	294.967.050,00	2.613.500,00	4.009.500,00	11.866.398,00	18.489.398,00	313.456.448,00	93,32%	1 Laporan	100,00%	
JUMLAH TOTAL BELANJA				7.555.494.363,00	4.632.916.997,00	328.364.817,00	497.926.614,00	1.151.785.393,00	1.978.076.824,00	6.610.993.821,00	87,50%		98,85%	

Bukittinggi, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Bukittinggi



**INDRA HARTATI, SKM, M.Si**  
Pembina NIP. 197503282000032003